

2020

## Perbandingan Dampak Alokasi Anggaran Terhadap Pendapatan Dalam Dua Rezim: Pilkada Langsung Versus Tidak Langsung

Aan Heriyana

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia*

Vid Adrison

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

---

### Recommended Citation

Heriyana, Aan and Adrison, Vid (2020) "Perbandingan Dampak Alokasi Anggaran Terhadap Pendapatan Dalam Dua Rezim: Pilkada Langsung Versus Tidak Langsung," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*. Vol. 16 : Iss. 1 , Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **Perbandingan Dampak Alokasi Anggaran Terhadap Pendapatan Dalam Dua Rezim: Pilkada Langsung Versus Tidak Langsung**

**Aan Heriyana<sup>1</sup>, Vid Adrison**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

### **Abstract**

*This study compares the impact of budget allocations between regions that have carried out direct regional elections and indirectly and their impact on regional per capita income. The budget allocation uses the allocation of capital expenditure and indirect expenditure on the Regional Expenditure Budget (APBD) of regencies and cities in Indonesia. Empirically, in the 2005-2010 period in Indonesia, the estimation results using Pooled Least Square did not show a significant difference in the impact of budget allocation on regional per capita income between the regime and direct versus indirect elections. But regionally there are significant differences in districts and cities in the island group of Sumatra when compared with other island groups in Indonesia, namely there are differences in the impact on the total budget that affects the per capita income where the average head of the region elected through the direct election impacts lower than indirectly selected regional heads.*

*Keywords: pilkada, budget allocation, per capita income*

### **Abstrak**

Penelitian ini membandingkan dampak alokasi anggaran antara daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan tidak langsung dan dampaknya terhadap pendapatan per kapita daerah. Alokasi anggaran menggunakan alokasi belanja modal dan belanja tidak langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota di Indonesia. Secara empiris pada kurun waktu 2005-2010 di Indonesia hasil estimasi dengan menggunakan Pooled Least Square tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dampak alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara rezim dengan pilkada langsung versus tidak langsung. Namun secara regional terjadi perbedaan signifikan di kabupaten dan kota pada kelompok pulau Sumatera bila dibandingkan dengan kelompok pulau lainnya di Indonesia, yaitu terdapat perbedaan dampak pada total anggaran yang berpengaruh terhadap pendapatan per kapita di mana secara rata-rata kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung dampaknya lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung.

Kata Kunci: pilkada, alokasi anggaran, pendapatan per kapita

### **PENDAHULUAN**

Sumber daya manusia dan sumber daya modal merupakan dua factor yang sangat mempengaruhi perekonomian; semakin tinggi kualitas dan kuantitas manusia dan modal maka produktivitas semakin meningkat sehingga meningkatkan output perekonomian. Menurut Lucas (1988)

misalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan dari tenaga kerja maka semakin tinggi produktifitas keseluruhan modal karena semakin terdidik lebih mungkin untuk berinovasi dengan demikian mempengaruhi produktifitas setiap orang. Selain itu interaksi antar individu yang memiliki keterampilan tinggi lebih mudah

---

<sup>1</sup> aanheriyana@gmail.com

menghasilkan inovasi atau teknologi yang akan menghasilkan dorongan produktifitas dibandingkan antar individu yang mempunyai keterampilan lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal dan penggunaan teknologi modern. Model Neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Sollow tahun 1956 menekankan bahwa pada pertumbuhan ekonomi, output akan terjadi atas dua faktor input utama yaitu modal dan angkatan kerja. Lebih jauh menurut Barro (1991) dalam model pertumbuhan neoklasik tingkat pertumbuhan per kapita suatu negara cenderung berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan per orang; di mana negara-negara yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara-negara kaya. Namun beberapa kritikus mengemukakan bahwa model neoklasik standar gagal menjelaskan perbedaan yang diamati dalam pendapatan di berbagai negara (Dewan dan Hussein, 2001).

Studi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menghubungkan demokrasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Misalnya studi awal yang dilakukan oleh Sirowy dan Inkeles (1990) tentang dampak demokrasi politik terhadap pertumbuhan ekonomi dan studi terbaru dengan menggunakan data panel dengan menggunakan *fixed-effect* dengan mengendalikn *time-invariant* karakteristik negara menunjukkan bahwa demokrasi memiliki efek positif pada pertumbuhan,

meskipun efek ini “tidak langsung” dalam arti bahwa demokrasi mempengaruhi pertumbuhan melalui misalnya meningkatkan modal manusia atau memperkuat perlindungan hak milik dan lain-lain (Rodrik dan Wacziarg 2005, Papaioannuo dan Siourounis 2008, Persson dan Tabellini 2009, Acemoglu dkk. 2014).

Di sisi lain tidak semua studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Studi yang melihat beberapa dimensi kebijakan sosial ekonomi (Gil, Casey dan SalaiMartin, 2004) menemukan bahwa demokrasi dikaitkan dengan tidak ada perbedaan dalam hasil pada studi yang dilakukan. Juga demokrasi tampaknya memiliki hubungan negatif yang lemah dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menggunakan data cross-section (Barro, 1996) dan hubungan positif yang lemah menggunakan data dan teknik lain (misalnya, Persson dan Tabellini, 2007; Rodrik dan Wacziarg, 2005).

Pemerintahan yang demokratis menyediakan lebih banyak barang publik karena ini adalah cara yang paling ekonomis untuk memuaskan mayoritas penduduk. Demokrasi menerapkan kebijakan yang mendukung mayoritas warga negara dengan cara menyediakan barang publik ke tingkat yang lebih tinggi (Besley dan Kudamatsu, 2008). Demokrasi akan meredistribusi pendapatan dari kaum kaya ke kaum miskin; dimana rezim-rezim demokratis umumnya memilih kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kaum miskin daripada rezim-rezim non

demokratis (Acemoglu dan Robinson, 2014). Selain itu distribusi kekuatan politik lebih setara daripada distribusi pendapatan atau kekayaan, karena keputusan publik dibuat (langsung atau tidak langsung) melalui pemungutan suara. (Gill, Casey dan Sala-i-Martin, 2004).

Milesi-Ferretti, Rostagno dan Perotti (2002) menemukan bahwa jumlah belanja publik berkorelasi dengan tipe sistem eksekutif dan pemilihan. Ketika pejabat publik dipilih secara adil, belanja publik kemudian menjadi tergantung pada bentuk lembaga pemungutan suara. Sistem pemilihan dan bentuk pemerintahan (parlementer atau presidensial) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pemilihan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya sehingga berkontribusi terhadap perbedaan pertumbuhan antar demokrasi (Persson dan Tabellini, 2003; Knutsen, 2011).

Indonesia telah menjadi salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan pluralistik di Asia Tenggara bahkan salah satu negara demokrasi terbesar dan terdesentralisasi di dunia (Luebke, 2009). Antara tahun 1999 dan 2009 warga negara Indonesia telah melakukan pemilihan sekitar 1600 perwakilan nasional, 30.000 anggota dewan lokal dan 800 gubernur, walikota dan bupati. Desentralisasi ini juga membawa provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntut otonomi yang lebih besar, dengan pembentukan daerah yurisdiksi baru yang telah meningkatkan jumlah pemerintah daerah secara signifikan, dari 26 provinsi dan 313 kabupaten/kota di tahun 1999

menjadi 34 provinsi dengan 514 kabupaten/kota di tahun 2017 (sumber data BPS).

Adanya desentralisasi daerah tersebut fungsi kontrol administratif, fiskal dan politik serta kebijakan-kebijakan telah diserahkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing daerah. Di samping itu dengan adanya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Hal ini mengubah sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya dimana kepala daerah dan wakilnya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan perwakilan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat umum. Perubahan sistem menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut bertujuan agar kepala daerah terpilih sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Skoufias (2014) dalam penelitiannya untuk melihat dampak pemilihan langsung pada belanja daerah, pendapatan dan surplus anggaran menyimpulkan bahwa pemilihan langsung tidak memiliki dampak signifikan terhadap total pengeluaran per kapita sebelum, selama dan setelah pemilihan di daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilihan pada tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya studi penelitian McCulloh & Malesky (2010) yang menguji hubungan antara tata kelola pemerintahan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dengan sampel 243 kabupaten dan kota di

Indonesia tahun 2001-2008 menemukan bukti yang relatif kecil mengenai hubungan yang kuat antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan kinerja perekonomian.

Martinez-Bravo, dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa mekanisme utama yang mendasari efek pemilu adalah meningkatnya insentif pemimpin, hal lainnya menurut Martinez-Bravo bahwa pemilihan menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi pada barang publik dan lebih banyak redistribusi pendapatan. Alasan lainnya seperti pendapat Knutsen (2011) “alokasi belanja merupakan motivasi strategi politik yang rasional bagi politisi” (dalam hal ini kepala daerah terpilih); hanya berpengaruh terhadap daerah atau kelompok tertentu sehingga cenderung kurang menghasilkan manfaat secara ekonomi. Singkatnya apakah kepala daerah terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung memberlakukan kebijakan alokasi belanja yang dapat mendorong pendapatan per kapita daerah daerah?

Studi penelitian ini menyelidiki secara seksama dan membandingkan kabupaten dan kota yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan yang tidak langsung; sehingga mengungkap ada tidaknya perbedaan alokasi anggaran yang berpengaruh antara daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung dengan yang masih melalui pemilihan secara tidak langsung. Hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan pengaruh alokasi anggaran dan pemilihan pilkada langsung versus tidak langsung dan

interaksi keduanya terhadap pendapatan per kapita. Dari hipotesis tersebut terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu daerah yang pemimpinnya dipilih melalui pilkada langsung mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi atukah lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang pemimpinnya dipilih melalui pilkada tidak langsung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Populasi dan Sistem Fiskal

Sebuah negara adalah populasi dari rangkaian kesatuan individual dengan total massa 1. Misal populasi dibagi ke dalam tiga grup yaitu A, B dan C dengan ukuran rata-rata masing-masing  $\mu_A$ ,  $\mu_B$  dan  $\mu_C$ . Ukuran ini bisa berbeda tetapi tidak ada group yang memiliki lebih dari 50 persen atau kurang dari 25 persen populasi. Negara ini terdiri dari tiga daerah, dengan masing-masing daerah dianggap sebagai bagian dari unit sub nasional dari negara sehingga pengeluaran pemerintah tidak dapat ditargetkan lebih baik daripada suatu daerah.

Terdapat dua tipe pengeluaran pemerintah yaitu transfer dan pembelian barang dan jasa atau barang publik. Semua warga negara yang memenuhi kriteria kelayakan kemudian memenuhi syarat tertentu akan mendapatkan transfer dari pemerintah terlepas dari dari wilayah tempat tinggalnya. Misalnya pensiun usia lanjut akan dibayarkan kepada semua penduduk secara nasional di atas usia tertentu dan telah membayar kontribusi yang cukup atau tunjangan pengangguran dibayarkan

kepada semua orang dengan riwayat pekerjaan menganggur. Namun sebaliknya pengeluaran untuk barang dan jasa bersifat lokal. Pemerintah lokal dapat memutuskan untuk membangun infrastruktur atau menyewa lebih banyak tenaga kerja dari luar wilayahnya misalnya. Hal ini terkait dengan masalah kebijakan bagaimana caranya pengeluaran ini terdistribusi secara merata.

Perbedaan dua jenis pengeluaran pemerintah ini dapat ditangkap dengan cara sederhana. Karena perbedaan karakteristik tersebut, individu dalam ketiga group berbeda dalam jenis transfer yang mereka berhak untuk: individu dalam kelompok  $j$  memperoleh manfaat dari transfer  $sj$  tetapi tidak dari transfer yang spesifik kepada kelompok lain. Sebaliknya individu dalam daerah  $k$  memperoleh manfaat dari utilitas dari pengeluaran barang publik dalam wilayah  $k$  yaitu  $g_k$  dan tidak dari barang publik spesifik kepada wilayah lainnya.

Semua individu mempunyai produktivitas yang sama, dimana dapat di normalkan pada nilai 1. Utilitas individu  $i$  pada group  $j$  pada wilayah  $k$  yaitu:

$$U_{ijk} = (1 - t)^{\alpha_i \beta_i} s_j^{\alpha_i(1-\beta_i)} g_k^{1-\alpha_i}$$

(1.1)

Di mana  $t$  adalah proporsi rate pajak, dan  $(1-t)$  adalah pendapatan individu setelah dikurangi pajak. Dengan demikian individu memiliki preferensi *cobb-douglas* atas penguraian *disposable income* menjadi pendapatan utama dan pendapatan transfer.

Dalam setiap group parameter  $\alpha_i$  dan  $\beta_i$  berdistribusi uniform dengan interval masing-masing  $[\alpha L, \alpha H]$  dan  $[\beta L, \beta H]$  dengan  $\alpha L, \beta L \geq 0$  dan  $\alpha H, \beta H \leq 1$ .

### Sistem Pemilihan Umum dan Formasi Pemerintahan

Nilai pajak  $t$ , transfer  $sj$  dan barang publik  $g_k$  diputuskan oleh wakil terpilih. Pertama, terkait dengan sistem pemilihan umum; mengambil pemisalan pada model sebelumnya dengan jumlah representatif dan ciri sistem pemilihan dengan jumlah pemilihan daerah sebanyak tiga. Pada kasus ekstrim masing-masing dari tiga daerah tersebut melaksanakan pemilihan untuk memilih satu perwakilan yang disebut dengan sistem mayoritas. Dan kasus ekstrim lainnya seluruh wilayah membuat sistem pemilihan tunggal secara nasional dengan memilih tiga perwakilan yang disebut dengan sistem proporsional.

Kedua, terkait dengan bagaimana pemerintah terbentuk dan keputusan publik yang dihasilkan. Cara sederhana untuk memformalkan formasi pemerintah yaitu satu dari tiga perwakilan dipilih secara acak untuk membentuk suatu pemerintahan dan membuat tawaran kepada perwakilan lain untuk bergabung dengan pemerintah dengan batasan memaksimalkan utilitas bersama anggotanya. Jika perwakilan yang kedua menerima maka pemerintah dibentuk dan kebijakan memutuskan dengan memaksimalkan fungsi utilitas bersama dari dua perwakilan. Jika perwakilan yang kedua tidak menerima maka membuat penawaran ke perwakilan ketiga. Namun jika ternyata menolak maka tidak ada

pengeluaran untuk transfer dan barang publik yang disahkan, dan semua perwakilan menerima utilitas *status-quo* nol. Formula ini memisahkan antara sistem pemilihan dari formasi pemerintah; sistem pemilihan merupakan cara perwakilan terpilih dan bukan merupakan jalan untuk pemerintah terbentuk.

**Pembentukan Kebijakan Pemerintah Pada Sistem Mayoritas**

Dalam sistem ini masing-masing dari tiga daerah memilih satu perwakilan. Diasumsikan satu grup lebih besar dari dua kelompok lainnya. Karena semua daerah mempunyai komposisi yang sama, maka tiga perwakilan akan menjadi milik grup terbesar. Misalnya grup terbesar yaitu B, maka pemerintah terdiri dari dua individu B, yang terpilih dari dua daerah yang berbeda yaitu k1 dan k2 dimana dua anggota pemerintah telah terpilih dan asterisk menandakan individu yang terpilih. Maka pemerintah akan memaksimalkan utilitas bersama sebagai berikut:

$$VM(k_1, k_2) = (\alpha_{k_1}^* \beta_{k_1}^* + \alpha_{k_2}^* \beta_{k_2}^*) \log(1 - t) + (\alpha_{k_1}^* (1 - \beta_{k_1}^*) + \alpha_{k_2}^* (1 - \beta_{k_2}^*)) \log sB + (1 - \alpha_{k_1}^*) \log g_{k_1}^M + (1 - \alpha_{k_2}^*) \log g_{k_2}^M \tag{1.2}$$

Di mana M adalah merupakan sistem mayoritas dan  $\alpha_{k_1}^*$  dan  $\beta_{k_1}^*$  merupakan preferensi individu yang terpilih di distrik ki. Perwakilan ini dan konstituennya menginginkan barang publik yang berbeda tetapi keduanya memperoleh utilitas hanya dari transfer sB. Dengan memaksimalkan

fungsi object di atas pada budget constraint pemerintah

$$t = \mu_B sB + g_{k_1} + g_{k_2}$$

dimana t adalah proporsi dari rate pajak dan agregat pendapatan ekonomi sama dengan 1. Artinya transfer per kapita sB hanya individu tipe B (fraksi  $\mu_B$  dari populasi) yang menerimanya; tidak ada alasan untuk kedua perwakilan dalam pemerintahan untuk memilih transfer positif yang menguntungkan bagi kedua grup lainnya.

Misal  $\bar{s}_j = \mu_j s_j$  merupakan total pengeluaran dari transfer ke grup j; dan  $\bar{s}_j$ , g, dan t merupakan share GDP transfers, pengeluaran dalam barang publik dan total pengeluaran yaitu  $\bar{s}_j \equiv \sum_{j=A}^C \mu_j s_j$  ;  $g \equiv \sum_{k=1}^3 g_k$  dan  $t \equiv \bar{s}_j + g$ . Maka kebijakan pemerintah yang memaksimalkan persamaan (1.2):

$$t^M(k_1, k_2) = \frac{2 - (\alpha_{k_1}^* \beta_{k_1}^* + \alpha_{k_2}^* \beta_{k_2}^*)}{2}$$

$$\bar{s}_B^M(k_1, k_2) = \frac{\alpha_{k_1}^* (1 - \beta_{k_1}^*) + \alpha_{k_2}^* (1 - \beta_{k_2}^*)}{2}; \bar{s}_A^M(k_1, k_2) = 0; \bar{s}_C^M(k_1, k_2) = 0 \tag{1.3}$$

$$g_{k_1}^M(k_1, k_2) = \frac{1 - \alpha_{k_1}^*}{2}; g_{k_2}^M(k_1, k_2) = \frac{1 - \alpha_{k_2}^*}{2}; g_{k_3}^M(k_1, k_2) = 0$$

$$g^M(k_1, k_2) \equiv g_{k_1}^M(k_1, k_2) + g_{k_2}^M(k_1, k_2) = \frac{2 - \alpha_{k_1}^* - \alpha_{k_2}^*}{2}$$

Di mana  $t^M(k_1, k_2)$  mengindikasikan nilai equilibrium dari total pengeluaran primer

pada sistem mayoritas ketika pemerintah dibentuk oleh perwakilan distrik  $k_1$  dan  $k_2$  dan juga untuk variabel kebijakan fiskal lainnya. Hasil yang sama didapatkan jika semua grup memiliki ukuran yang sama. Dimana ketika hal ini terjadi maka hasil pemilihan bersifat random.

### Pilihan Perwakilan Pada Sistem Mayoritas

Pada tahap pertama, setiap kelompok memilih secara bersamaan dengan sistem mayoritas dengan memilih wakilnya sendiri di antara anggotanya, sehingga ruang kandidat yang mungkin berada pada persegi panjang dengan panjang  $[\alpha L, \alpha H]$  dan tinggi  $[\beta L, \beta H]$ . Individu dengan nilai median dari parameter  $\alpha$  dan  $\beta$  adalah pemilih yang menentukan di masing-masing kelompok. Pemilih median dari grup B pada daerah  $k_1$  memaksimalkan  $\alpha_{k_1}^*$  dan  $\beta_{k_1}^*$  fungsi utilitas.

$$E(V_{mBk_1}^M) = \sum_{r=2}^3 [\alpha_m \beta_m \log(1 - t^M(k_1, k_r)) + \alpha_m (1 - \beta_m) \log S_B^M(k_1, k_r) + (1 - \alpha_m) \log g_{k_1}^M(k_1, k_2)] \quad (1.4)$$

Dari persamaan (1.3) didapatkan:

$$t^M(k_1, k_r), S_B^M(k_1, k_r), g_{k_1}^M(k_1, k_r)$$

Dengan mengambil kondisi orde pertama dan membuat simetri antara kedua distrik maka dapat diperoleh  $\alpha^*$  dan  $\beta^*$  yang disukai oleh pemilih median dalam sistem mayoritas sebagai berikut:

$$\alpha^{*M} = \frac{\alpha_m}{2 - \alpha_m}; \beta^{*M} = \beta_m$$

(1.5)

Maka pemilih median menginginkan perwakilan dengan nilai median  $b$  tetapi nilai di bawah median. dalam sistem mayoritas, semua perwakilan dan anggota pemerintah mendapat manfaat dari transfer yang sama, tetapi dari barang publik yang berbeda. maka pemilih median di distrik  $k$  mencoba untuk menyalahi keputusan pemerintah terhadap kebaikan publiknya sendiri dengan memilih seorang individu dengan preferensi untuk pengeluaran tinggi pada barang publik relatif terhadap transfer. dalam equilibrium hasilnya hanya pengeluaran tinggi untuk dua barang publik yang didanai. Substitusi 1.5 ke 1.3 didapatkan:

$$t^M = 1 - \frac{\alpha_m \beta_m}{2 - \alpha_m}$$

$$\bar{s}^M = \frac{\alpha_m (1 - \beta_m)}{2 - \alpha_m}$$

$$g^M = \frac{2(1 - \alpha_m)}{2 - \alpha_m}$$

### Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Przeworski dan Limongi (1993) rezim politik dicirikan oleh dua ciri. Pertama, cara pengambilan keputusan tentang ukuran pemerintahan dibuat oleh warga negara melalui proses pemungutan suara ataukah dibuat oleh aparat negara. Kedua, penggunaan hak milik atas *residu fiskal* (selisih antara total output dan biaya pemerintah) dapat dikonsumsi secara pribadi oleh aparaturnegara ataukah aparat negara tidak memiliki hak hukum digunakan secara pribadi.

Lebih lanjut rezim dibedakan menjadi tiga yaitu demokrasi; di mana warga negara memutuskan ukuran pemerintahan dan



memiliki hak atas *residuum fiskal*, otokrasi; di mana aparat negara menentukan ukuran pemerintahan dan dapat menyesuaikan *residuum fiskal*, birokrasi; di mana aparatur negara menentukan ukuran pemerintahan namun warga negara memiliki hak atas *residuum fiskal* (Przeworski dan Limongi, 1993). Sedangkan demokrasi menurut Joseph Schumpeter adalah pengaturan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu mendapatkan wewenang untuk mengambil kebijakan melalui perjuangan yang kompetitif dengan meraih suara rakyat (Gerring, etc. 2005).

### **Desentralisasi Keuangan**

Teori Desentralisasi Oates tahun 1972 berpendapat bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokatif dengan membawa keragaman yang lebih besar ke dalam penyediaan layanan publik, sehingga dapat melayani preferensi heterogen untuk barang publik (*preference-matching*). Selain itu desentralisasi meningkatkan efisiensi produktif penyampaian layanan pemerintah. Desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi politik konstituen, yang akan membuat pemerintah daerah menjadi lebih responsif dibandingkan pemerintah pusat terhadap kebutuhan lokal.

Secara teoritis, desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah tingkat bawah. Menurut Cheema dan Rondinelli (2007) desentralisasi juga telah berubah tidak hanya tentang masalah politik tetapi juga terkait dengan otoritas sumber daya, termasuk masalah fiskal. Kekuatan

distribusi keuangan termasuk transfer pendapatan publik, delegasi fiskal baik di sisi pendapatan meningkat dalam jumlah dan alokasi pengeluaran, serta otonomi fiskal untuk semua tingkat pemerintah daerah.

Dengan menerapkan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak hanya dapat belajar bagaimana membuat keputusan yang baik untuk meningkatkan dan mengelola anggaran mereka untuk meningkatkan kesejahteraan warga mereka. Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketidakseimbangan vertikal), mengurangi kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain (ketidakseimbangan horizontal).

Dalam konteks Indonesia dibawah UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 memperkuat pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengawasi tingkat kabupaten salah satunya mengenai implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Di mana salah satu kriteria alokasi pusat ke daerah haruslah memenuhi kebutuhan daerah yang diukur dari belanja daerah. Sementara fungsi dari otoritas yang diberikan (kebutuhan fiskal) harus dapat melindungi upaya untuk mengeksplorasi pendapatan lokal (pendapatan daerah) di wilayah tersebut serta harus adil, transparan dan terbuka.

### **Model Pemilihan**

Literatur ekonomi politik mengidentifikasi dua lembaga politik utama yaitu sistem

parlementer dan presidensial (Persson dan Tabellini, 2004). Dalam rezim parlementer, parlemen terpilih menunjuk pimpinan puncak eksekutif (pemilihan tidak langsung) sedangkan dalam rezim presidensial warga secara langsung memilih eksekutif (pemilihan langsung).

Model agen utama di mana pemilih yang berperan utama melalui suatu pemilihan dengan menuntut pemerintah dalam hal ini sebagai agen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Fitur utamanya adalah warga memiliki kemampuan untuk memilih dan memantau pemerintah. Jika pemilihan dapat menurunkan insentif atau kemampuan pemerintah untuk menciptakan peraturan dalam mencari uang sewa maka lingkungan ekonomi yang lebih baik akan muncul (Morizs dan Sjöholm, 2014).

Di samping model agen utama, model median pemilih menunjukkan pemilihan dapat menyebabkan redistribusi pendapatan lebih banyak, akumulasi modal yang lebih sedikit dan pertumbuhan ekonomi yang rendah (Alesina dan Rodrik, 1994). Model median pemilih adalah di mana ada dua kandiddat atau partai salah satunya akan diberi kekuasaan membuat kebijakan publik sampai pemilu berikutnya; jika pemilih memberikan suara untuk partai atau kandidat yang paling dekat dengan kebijakan yang paling disukai, ternyata kandidat yang paling dekat dengan pemilih rata-rata selalu memenangkan pemilihan (Congleton, 2002).

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data**

Data panel mencakup kabupaten dan kota di Indonesia dari tahun 2005-2010. Penggunaan tahun data 2005 ke 2010 dalam penelitian ini untuk mempertahankan kelompok kontrol yang valid dari siklus pemilihan. Di mana pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten dan kota pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2005 dengan asumsi masa jabatan kepemimpinan selama 5 tahun sampai 2010. Sehingga untuk menangkap perbedaan antara daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung versus tidak langsung dibuat dengan cara memilih daerah yang telah ada sebelum tahun 2005 dan melaksanakan pilkada langsung pertama kali antara tahun 2005-2007, dan nilai variabel seperti PDRB tanpa migas, tingkat pendidikan, tenaga kerja dan kemiskinan yang digunakan yaitu nilai pada daerah tersebut pada tahun 2008-2010.

### **Pendapatan per kapita kabupaten/kota**

Pendapatan per kapita dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB yang digunakan adalah PDRB riil (atas dasar harga konstan) tanpa migas tahun dasar 2000. PDRB atas dasar harga konstan dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun dan sebagai gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah. PDRB yang digunakan adalah PDRB riil non migas yaitu penjumlahan dari seluruh sektor kecuali untuk subsektor pertambangan

minyak dan gas serta produksi minyak dan gas yang dipilih atas asumsi kesetaraan endowment wilayah secara mendasar. Selain itu keberadaan sumber daya alam yang terkonsentrasi (dalam hal ini minyak) membuka peluang pertumbuhan yang lebih signifikan namun juga rente yang lebih besar (McCulloch dan Malesky, 2010). Satuan yang digunakan dalam pendapatan per kapita adalah rupiah.

Salah satu cara menghemat biaya produksi adalah melalui aglomerasi. Aglomerasi terbentuk akibat pertimbangan lokasi dan urbanisasi juga dapat terbentuk dari kondisi geografis dan kondisi sumber daya alam yang dicirikan dengan cakupan industri, geografis dan temporal wilayah. Aglomerasi ekonomi di suatu wilayah mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi, sedangkan pada wilayah lain yang tidak mampu bersaing akan mengalami kemunduran dalam pertumbuhan ekonominya (Kuncoro, 2004). Lebih jauh menurut Kuncoro (2004) bahwa pola spasial pembangunan di Indonesia menunjukkan ketimpangan distribusi industri secara geografis; dimana daerah industri yang utama di Indonesia berlokasi di Jawa.

Oleh karena itu dibuat kelompok pulau berdasarkan perbedaan karakteristik dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yang ditandai dengan daerah-daerah yang lebih luas, jumlah penduduk yang jarang dan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki daerah-daerah di luar Jawa misalnya menjadi dasar pengelompokan

ini. Kelompok pulau terdiri dari pulau Sumatera, pulau Jawa dan Bali, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan kelompok pulau terakhir yang terdiri dari Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Total Belanja, Belanja Modal dan Belanja Tidak Langsung**

Total belanja merupakan total keseluruhan belanja langsung, belanja tak langsung dan belanja pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai (belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai (pengeluaran upah honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Alasan alokasi belanja tersebut didasarkan atas perbedaan jangka waktu manfaat antara belanja tidak langsung dengan belanja modal. Belanja tidak langsung memiliki manfaat jangka pendek sehingga dampaknya dapat dirasakan pada tahun yang sama, sementara belanja modal memiliki manfaat jangka panjang yang dampaknya dapat dirasakan pada tahun-tahun mendatang begitu juga penyerapan belanja modal lebih lambat dari belanja tidak langsung karena melalui proses lelang yang lebih lama.

#### **Pemilihan Pilkada Secara Langsung / Election**

Untuk mengukur variabel pemilihan pilkada secara langsung mengambil nilai satu pada tahun 2008-2010 untuk periode dimana dari tahun 2005-2007 pada kabupaten dan kota terjadi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dan nol pada tahun 2008-2010 untuk periode dimana dari tahun 2005-2007 untuk kabupaten dan kota belum/tidak melaksanakan pemilihan pilkada langsung. Hal ini diharapkan dapat menangkap perbedaan antara kabupaten dan kota yang telah melaksanakan pemilihan kepala

daerah secara langsung dengan yang belum melaksanakan pilkada secara langsung.

Sehingga variabel pendapatan per kapita, alokasi anggaran dan variabel kontrol lainnya nilainya merupakan nilai yang dimulai pada tahun 2008-2010. Dengan asumsi bahwa efek alokasi anggaran dan variabel lainnya baru bisa dirasakan setelah 3 tahun kepala daerah terpilih yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Papaioannou dan Siourounis (2008) yang mengemukakan bahwa pola pertumbuhan berbentuk **J-shape** pada saat transisi pemerintahan terjadi pertumbuhan yang lambat dan bahkan negatif namun setelah tahun ketiga tumbuh dan stabil pada tingkat yang lebih tinggi.

Hal tersebut juga sesuai dengan realitas realitas kebijakan anggaran yang terjadi di Indonesia jika pemilihan berlangsung pada kuartal terakhir setahun, baik yang terpilih secara demokratis maupun pemilihan lokal langsung maka kepala daerah terpilih hanya dapat merevisi anggaran yang sedang berlangsung sebelum kuartal terakhir setiap tahun (UU No.22 tahun 1999). Otomatis alokasi anggaran berdasarkan penyusunan kepala daerah yang baru baru bisa sepenuhnya diwujudkan pada tahun berikutnya dan dampaknya satu tahun setelahnya; sehingga total 3 tahun baru terasa dampaknya.

#### **School - Enrollment Rate**

Selain sumber daya modal yang diproksi melalui alokasi anggaran dalam APBD juga digunakan sumber daya manusia sebagai

variabel kontrol menggunakan *school-enrollment rate* yang didefinisikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Kelompok usia tersebut adalah kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun), kelompok usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) dan kelompok usia sekolah menengah atas (16-18 tahun). Pada penelitian ini hanya akan digunakan kelompok usia sekolah dasar dan kelompok usia menengah atas sebagai proksi untuk modal manusia, mengikuti empiris yang telah dilakukan oleh Barro (1991).

Alasan yang mendasarinya yaitu peningkatan kuantitas modal manusia per orang cenderung mengarah ke tingkat yang lebih tinggi investasi dalam modal manusia dan fisik, sehingga lebih banyak produktif dalam memproduksi barang dan jasa yang pada akhirnya menjadi lebih tinggi pendapatan per kapita. Kemudian dipilihnya tingkat pendidikan yang rendah karena memiliki risiko lebih tinggi tinggi menjadi pengangguran dalam kaitannya dengan gambaran perubahan dalam permintaan tenaga kerja, sedangkan pendidikan tinggi bisa menunjukkan penguasaan dalam hal pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat teknologi tinggi. Selain itu pendidikan menurut UNESCO (*United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization*) berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan dan gizi serta meningkatkan mutu standar hidup.

### **Rasio Penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk**

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu wilayah adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja. Jumlah Penduduk adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja untuk sementara waktu namun memiliki pekerjaan, serta mereka yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan:

- Bekerja : sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk memperoleh upah atau membantu orang lain dalam memperoleh upah atau keuntungan selama paling tidak satu jam selama minggu survei.

- Sedang tidak bekerja untuk sementara waktu namun memiliki pekerjaan: aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja karena berbagai alasan selama minggu survei.
- Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja: semua orang yang memiliki pekerjaan namun sedang mencari kerja selama minggu survei/pengangguran terbuka.

Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

#### **Penduduk Bekerja di Pertanian**

Variabel lainnya yaitu jumlah penduduk yang persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap angkatan kerja sebagai ciri khas karakteristik negara berkembang seperti Indonesia. Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan dimana tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa. Dimana pada umumnya negara berkembang memiliki sektor pertanian yang besar, guncangan supply yang merugikan pada sektor ini memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Dewan dan Hussein, 2001).

#### **Persentase Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS). Sedangkan yang dimaksud dengan persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

#### **Model Penelitian**

Model menggunakan estimasi data *Pooled Least Square* (PLS) dan spesifikasi empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Model 1 (menggunakan total belanja)**

Tanpa menggunakan variabel kontrol

$$\ln y_{it} = a + b_0 \ln y_{i,t0} + b_1 E + b_2 T_{it} + b_3 (E)(T_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (2.1)$$

Dengan menggunakan variabel kontrol

$$\ln y_{it} = a + b_0 \ln y_{i,t0} + b_1 E + b_2 T_{it} + b_3 (E)(T_{it}) + b_4 P_{it} + b_5 S_{it} + b_6 R_{it} + b_7 A_{it} + b_8 K_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.2)$$

##### **Model 2 (menggunakan belanja modal dan belanja tidak langsung)**

Tanpa menggunakan variabel kontrol

$$\ln y_{it} = a + b_0 \ln y_{i,t0} + b_1 E + b_2 M_{it} + b_3 I_{it} + b_4 (E)(M_{it}) + b_5 (E)(I_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (2.3)$$

Dengan menggunakan variabel kontrol

$$\ln y_{it} = a + b_0 \ln y_{i,t0} + b_1 E + b_2 M_{it} + b_3 I_{it} + b_4 (E)(M_{it}) + b_5 (E)(I_{it}) + b_4 P_{it} + b_5 S_{it} + b_6 R_{it} + b_7 A_{it} + b_8 K_{it} + \epsilon_{it} \quad (2.4)$$

secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pertama kali dimulai pada tahun

**Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Jumlah Kabupaten/Kota Dari 2001-2015**

Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pilkada di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Hasil Pemekaran Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota Seluruhnya
2001		13	338
2002		37	351
2003		50	388
2004		2	438
2005	206		440
2006	71		440
2007	36	25	440
2008	136	30	465
2009	1	2	495
2010	214		497
2011	62		497
2012	68	4	497
2013	130	10	501
2014		3	511
2015	258		514

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Data

Sejak tahun 2001 terjadi peningkatan jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Pada tabel 4.1 jumlah kabupaten dan kota pada tahun 2015 adalah 514 kabupaten dan kota meningkat sekitar 50% dari tahun 2001 yang hanya 338 kabupaten dan kota. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran wilayah dengan intensitas tinggi terjadi pada awal 2001 dimana baru dicanangkannya era otonomi daerah. Total peningkatan jumlah kabupaten dan kota pada masa awal ini dari 2001-2004 sebanyak 102 kabupaten dimana pada masa ini kepala daerah dipilih

2005. Di mana pada tahun awal pilkada langsung dimulai di 206 kab/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pilkada ini mengikuti masa berakhir pemerintahan sebelumnya sehingga pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak seluruhnya serentak pada tahun yang sama. Pada tabel 1 periode 2005-2009 merupakan periode dimana terjadi pelaksanaan pilkada pertama kali di kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan mengikuti aturan masa jabatan 5 tahun kepala daerah di Indonesia pada tahun 2010 merupakan masa pilkada langsung kedua bagi sebagian besar daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung pada tahun 2005. Studi dalam penelitian ini hanya menangkap kabupaten dan kota pada

periode pertama pilkada langsung dan tidak mengikutsertakan daerah baru pada periode 2005-2010.

### Hasil Estimasi dan Pembahasan

Analisa model 1 dan model 2 secara umum Pada model pertama variabel yang dimasukkan adalah variabel total anggaran yang merupakan jumlah total dari belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja pembiayaan. Variabel lainnya yang digunakan yaitu election yaitu diset bernilai 1 pada tahun 2005-2007 kabupaten dan kota melaksanakan pilkada secara langsung untuk pertama kalinya dan tidak menghitung daerah baru atau pemekaran.

Misalnya suatu kabupaten melaksanakan pilkada pertama kali pada tahun 2006, maka nilai dari variabel elect ini bernilai 1 pada tahun 2008-2010 dan nilai variabel lainnya mengikuti nilai pada tahun 2008-2010. Sedangkan variabel lainnya adalah interaksi antara election dengan total anggaran ditambah dengan beberapa variabel kontrol.

Dari tabel 2 variabel total anggaran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita kabupaten/kota sebesar 0.0496 dengan taraf nyata 1 % seperti ditunjukkan pada kolom (2) model 1 dengan variabel kontrol. Sedangkan alokasi

**Tabel 3. Hasil Estimasi *Pooled Least Square* pada Model 1 per Kelompok Pulau di Indonesia (2008-2010)**

VARIABLES	(1) <i>Sumatera</i>	(2) <i>Jawa dan Bali</i>	(3) <i>Kalimantan</i>	(4) <i>Sulawesi</i>	(5) <i>Nusa Tenggara, Maluku dan Papua</i>
<i>initial condition 2008</i>	0.950*** (0.0120)	0.998*** (0.00510)	0.992*** (0.00841)	0.923*** (0.0228)	0.984*** (0.0116)
<i>ln_totalex</i>	0.141*** (0.0509)	-0.0110 (0.0120)	0.0366 (0.0254)	0.136* (0.0735)	0.00609 (0.0916)
<i>election</i>	1.548* (0.905)	-0.357 (0.241)	0.252 (0.503)	1.018 (1.222)	-0.0165 (1.859)
<i>(election)(totalex)</i>	-0.0805* (0.0466)	0.0182 (0.0121)	-0.0124 (0.0258)	-0.0535 (0.0635)	0.00256 (0.0960)
<i>primaryschool</i>	0.00852*** (0.00263)	0.00308*** (0.00108)	0.00388** (0.00177)	0.00641* (0.00359)	-0.00178 (0.00141)
<i>secondaryschool</i>	-0.00102* (0.000576)	0.000121 (0.000244)	0.000300 (0.000444)	-0.000608 (0.000903)	-0.000185 (0.000689)
<i>persen_workperpopulation</i>	1.33e-05 (0.000156)	-0.00101* (0.000525)	-0.000137 (0.000149)	-0.00246*** (0.000864)	-0.00124 (0.000799)
<i>persen_workagricultural</i>	-0.00224*** (0.000274)	0.000858*** (0.000192)	0.000290 (0.000238)	-0.00190*** (0.000417)	-0.00111*** (0.000350)
<i>persen_poverty</i>	-0.000854 (0.00122)	-0.00340*** (0.000457)	-0.00790*** (0.00168)	-0.00301* (0.00177)	-0.000698 (0.000994)
<i>Constant</i>	-2.620*** (0.886)	0.0657 (0.225)	-0.888* (0.519)	-1.821 (1.200)	0.419 (1.731)
<i>Observations</i>	387	354	135	183	210
<i>R-squared</i>	0.981	0.998	0.998	0.977	0.983

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



belanja tidak langsung dan belanja modal tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita baik pada kolom (3) maupun kolom (4). Salah satu kemungkinan yang menyebabkan tidak signifikan pada alokasi anggaran tersebut adalah karena jangka waktu observasi yang terlalu pendek untuk

bisa menangkap efek alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita.

Pengaruh variabel kontrol yang digunakan pada umumnya signifikan terhadap pendapatan per kapita daerah. Akan tetapi pengaruh dari pemilihan pilkada langsung tidak berbeda signifikan, yang artinya

**Tabel 4. Hasil Estimasi *Pooled Least Square* pada Model 2 per Kelompok Pulau di Indonesia (2008-2010)**

VARIABLES	(1) <i>Sumatera</i>	(2) <i>Jawa dan Bali</i>	(3) <i>Kalimantan</i>	(4) <i>Sulawesi</i>	(5) <i>Nusa Tenggara, Maluku dan Papua</i>
<i>initial condition 2008</i>	0.974*** (0.00807)	0.997*** (0.00266)	1.005*** (0.00561)	0.951*** (0.0129)	0.982*** (0.0122)
<i>indirectexp</i>	0.0330 (0.336)	<b>0.118**</b> (0.0592)	0.0703 (0.107)	-0.182 (0.326)	-0.375 (0.306)
<i>capitalex</i>	-0.0654 (0.388)	<b>-0.164*</b> (0.0989)	0.00271 (0.119)	-0.460 (0.325)	<b>-0.714*</b> (0.403)
<i>election</i>	-0.341 (0.274)	-0.0586 (0.0625)	-0.00285 (0.102)	-0.431 (0.271)	-0.212 (0.264)
<i>(election)(indirectexp)</i>	0.380 (0.351)	0.0670 (0.0737)	0.0812 (0.138)	0.523 (0.375)	0.238 (0.334)
<i>(election)(capitalex)</i>	0.532 (0.408)	0.114 (0.117)	-0.0593 (0.145)	0.612 (0.385)	0.528 (0.440)
<i>primaryschool</i>	0.00911*** (0.00263)	0.00175* (0.00100)	0.00285* (0.00170)	0.00728** (0.00351)	-0.00173 (0.00139)
<i>secondaryschool</i>	-0.00109* (0.000598)	-0.000101 (0.000224)	0.000835* (0.000440)	-0.00110 (0.000910)	-0.000415 (0.000703)
<i>persen_workperpopulation</i>	2.24e-06 (0.000155)	-0.000767 (0.000482)	-4.95e-05 (0.000145)	-0.00255*** (0.000864)	-0.00114 (0.000804)
<i>persen_workagricultural</i>	-0.00241*** (0.000284)	0.000306 (0.000192)	0.000429* (0.000228)	-0.00183*** (0.000421)	-0.00113*** (0.000346)
<i>persen_poverty</i>	0.000415 (0.00119)	-0.00312*** (0.000424)	-0.00659*** (0.00161)	-0.00173 (0.00179)	-0.000967 (0.00106)
<i>Constant</i>	-0.278 (0.364)	-0.0516 (0.117)	-0.326 (0.200)	0.533 (0.464)	0.938*** (0.346)
<i>Observations</i>	387	354	135	183	210
<i>R-squared</i>	0.981	0.998	0.998	0.978	0.984

Standard errors in parentheses  
 \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara pemimpin yang dipilih secara langsung dengan pemimpin yang masih dipilih secara tidak langsung dalam hal pendapatan per kapita daerahnya. Begitupun dengan interaksi pilkada langsung dengan total belanja, alokasi belanja tidak langsung serta interaksi dengan belanja modal pada tabel 2 kolom (2) dan (4) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada perbedaan dampak alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung versus tidak langsung.

Analisa model 1 dan model 2 pada kelompok pulau

Dalam teori aglomerasi disebutkan bahwa wilayah dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan kepadatan modal manusia yang tinggi akan mendorong produktifitas wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah dengan sumber daya manusia yang lebih rendah serta kepadatan modal manusia yang lebih rendah juga. Hal ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa interaksi antar sesama individu yang mempunyai keterampilan atau keahlian yang tinggi akan menjadi dorongan mempermudah melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan produktifitas lebih tinggi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita lebih tinggi

Pada tabel 3 menggunakan hasil estimasi berdasarkan kelompok pulau yaitu kelompok pulau sumatera, jawa dan bali,

kalimantan, sulawesi dan nusa tenggara, maluku papua bertujuan untuk melihat dampak variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini per regional terhadap pendapatan per kapita tanpa migas. Hasilnya dari tabel 3 total belanja signifikan terhadap pendapatan per kapita daerah hanya terjadi di wilayah Sumatera sebesar 0.141 dengan taraf nyata 1 % dan wilayah Sulawesi dengan taraf nyata sebesar 10%. Kemudian pengaruh pilkada langsung pada umumnya hampir di semua wilayah tidak signifikan kecuali wilayah Sumatera sebesar 1.548 dengan taraf nyata 10%.

Hal yang sama hanya terjadi di wilayah Sumatera saja terdapat perbedaan dampak total belanja terhadap pendapatan per kapita daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung dengan daerah yang belum melaksanakan pilkada secara langsung seperti ditunjukkan kolom (1) interaksi antara pilkada langsung (*election*) dengan total anggaran (*totalex*) sebesar -0.0805 pada taraf nyata 10%. Yang artinya adalah bahwa daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung cenderung menurunkan dampak dari total belanja terhadap pendapatan per kapita daerah bila dibandingkan dengan pemimpin daerah yang masih dipilih secara tidak langsung.

Demikian halnya seperti pada tabel 4 tidak ada perbedaan dampak alokasi anggaran belanja tidak langsung maupun belanja modal terhadap pendapatan per kapita daerah pada rezim pilkada langsung versus tidak langsung. Pada tabel 4 dari kolom (1) sampai dengan kolom (5) tidak

menunjukkan signifikansi dampak pilkada langsung itu sendiri maupun interaksinya dengan belanja tidak langsung dan belanja modal. Sedangkan dampak belanja tidak langsung signifikan dengan arah yang positif terhadap pendapatan per kapita daerah terjadi di kelompok pulau Jawa dan Bali sebesar 0.118 dengan taraf nyata 5% sedangkan terjadi hal sebaliknya pada belanja modal sebesar -0.164 pada taraf nyata 10%.

Secara umum dari hasil estimasi di atas tidak terjadi perbedaan yang signifikan (kecuali total anggaran di wilayah Sumatera) alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara daerah yang telah melaksanakan pilkada langsung versus tidak langsung. Merujuk hasil penelitian dari Syahrir (2013) terjadinya siklus anggaran politik pada pilkada langsung pertama di Indonesia di kabupaten dan kota. Dimana dengan umur demokrasi yang relatif baru dengan adanya pilkada langsung kepala daerah terpilih sering tidak memegang kendali parlemen lokal sebagai pengambil keputusan anggaran sehingga tidak dapat mendorong maksimal peningkatan anggaran tertentu yang diusung kepala daerah terpilih untuk meningkatkan pendapatan per kapita daerah.

Alasan lainnya menurut Syahrir (2013) adalah terjadinya kecenderungan dari pejabat lama untuk dapat terpilih kembali dengan menggunakan alokasi anggaran yang sifatnya diskresional (seperti bantuan, hibah dalam alokasi belanja tidak langsung) untuk meningkatkan kemungkinan terpilih

kembali. Sehingga struktur anggaran yang dihasilkan antara kepala daerah terpilih kurang mencerminkan alokasi anggaran yang mencerminkan preferensi masyarakat pemilihnya yang akibatnya kesejahteraan daerah tidak tercapai sepenuhnya.

## KESIMPULAN

Secara empiris hasil estimasi dengan menggunakan *Pooled Least Square* secara umum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara rezim dengan pilkada langsung versus tidak langsung. Hasil lainnya terjadi perbedaan signifikan di wilayah Sumatera yaitu pada kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung dalam total anggaran yang berpengaruh terhadap pendapatan per kapita secara rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung.

Hal tersebut mengindikasikan perlunya kebijakan pemerintah yang berbasis regional agar tepat sasaran dan lebih efektif. Karakteristik masing-masing daerah antar pulau di Indonesia yang berbeda dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang bervariasi perlu menjadi perhatian khusus dari pengambil kebijakan di pemerintah. Selain itu faktor kualitas pemimpin kepala daerah yang terpilih ikut serta menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong pendapatan per kapita daerah melalui kebijakan yang alokasi anggaran yang disusunnya. Dan dari hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan sistem

pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia; di mana dengan anggaran yang lebih besar dengan melakukan pilkada langsung dibandingkan secara tidak langsung ternyata tidak menghasilkan pemimpin daerah yang tidak jauh berbeda dalam hal peningkatan per kapita daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D, S Naidu, P Restrepo and J A Robinson (2014). “*Democracy does cause growth*,” *NBER Working Paper* No. 20004.
- Barro, R. J. (1991). “Economic Growth in a Cross Section of Countries,” *The Quarterly Journal of Economics*, vol.106 No.2 pp.407-443.
- Barro, R.J. (1996). “Democracy and Growth”, *Journal of Economic Growth* 1, 1-27
- Besley, T., and M. Kudamatsu (2008): “*Making Autocracy Work*,” in *Institutions and Economic Performance*, ed. By E. Helpman. Harvard University Press, Cambridge.
- Carbone, G. (2012). “*Do new democracies deliver social welfare? Political regimes and health policy in Ghana and Cameroon*” Taylor & Francis Vol. 19, No. 2, 157–183.
- Dewan, E. Dan Hussein S. (2001). *Determinants of Economic Growth (Panel Data Approach)*. Working Paper 01/04. Economic Department Reserve Bank of Fiji.
- Doucouliafos H and Ulubasoglu MA (2008). “Democracy and economic growth: A meta-analysis”. *American Journal of Political Science* 52(1): 61–83.
- Garcia dan Soelistianingsih (1998). Why Do Differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia?. *Bulltein of Indonesian Economic Studies*.
- Gerring, J., P. Bond, W. Barndt, and C. Moreno (2005). “Democracy and growth: A historical perspective”. *World Politics* 57: 323–364
- Gil, R., M. Casey, and X. SalaiMartin (2004): “Do democracies have different public policies than nondemocracies?,” *Journal of Economic Perspectives*
- Islam, S. (1995): The human development index and per capita GDP, *Applied Economics Letters*, 2:5, 166-167.
- Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 4, Nov , 1127-1170.
- Helliwell, J F (1994). “*Empirical linkages between democracy and economic growth*”, *NBER Working Paper* No. 4066.
- Knutsen CH (2011). “Which democracies prosper? Electoral rules, form of government and economic growth”. *Electoral Studies* 30(1): 83–90.
- Knutsen CH (2012). “Democracy and Economic Growth: A Survey of Arguments and Results”. *International Area Studies Review* 15(4): 393-415.
- Lucas, R.E (1988). On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22: 3-42
- Martinez-Bravo, M., etc. (2012). “*The effect of Democratization on Public Goods and Redistribution: Evidence From China*”. *NBER Working Paper Series* No.18101.
- McCulloch, N., dan Malesky, E. (2010). “*Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia* *IDS Working Papers* 369, *Institute of Development Studies*.
- Milesi-Ferreti, G., M. Rostagno and Roberto Perotti. (2002). “Electoral Systems and Public Spending.” *Quarterly Journal of Economics*. May, 117:2, pp. 609–57
- McArthur dan Mc Cord (2017). Fertilizing Growth: Agricultural Inputs adn their

- effect in economic development. *Journal of Development Economics*
- Moricz, S., dan Sjöholm, F. (2014). The Effect of Election on Economic Growth: Results from a Natural Experiment in Indonesia. IFN Working Paper No 1023. *Research Institute of Industrial Economics*.
- Papaioannou, E and G Siourounis (2008) "Democratisation and growth", *The Economic Journal* 118: 1520-1551.
- Pepinsky, T.C, dan Wihardja, M.M. (2009). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Paper presented at the 2009 Annual Meeting of the American Political Science Association*. Chicago
- Persson, Torsten, Guido Tabellini, (2004a) "Constitutions and Economic Policy", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 18, No. 1, (Winter). pp. 75-98.
- \_\_\_\_\_ (2004b) "Constitutional Rules and Fiscal Policy Outcomes", *American Economic Review*, Vol. 94, No. 1, (March). pp. 25-45
- Persson T and Tabellini G (2003). *The Economic Effect of Constitutions*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Persson T and Tabellini G (2006). Democracy and development: The devil in the details. *American Economic Review* 96(2): 319–324
- Persson, T., dan Tabellini, G. (2007). *The Growth Effect of Democracy: Is it Heterogeneous and How Can It Be Estimated? NBER Working Paper* 13150.
- Persson, T and G Tabellini (2009). "Democratic capital: The nexus of political and economic change", *American Economic Journal: Macroeconomics* 1: 88-126.
- Przeworski, Adam dan Limongi, Fernando (1997). "Modernization : Theories and Facts" , *World Politics*, 49, pp 155-183.
- Rodrik, D and R Wacziarg (2005). "Do democratic transitions produce bad economic outcomes?", *American Economic Review*, 95: 50-55.
- Sirowy, L and A Inkeles (1990). "The effects of democracy on economic growth and inequality: A review", *Studies In Comparative International Development*, 25: 126-157.
- Sjahrir, B.S dan Kis-Katos, K. (2011). "Does local governments' responsiveness increase with decentralization and democratization? Evidence from sub-national budget allocation in Indonesia". University Of Freiburg, Germany.
- Sjahrir, B.S., K. Kis-Katos and G.G. Schulze. (2013) 'Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level' *Economics Letters* 120, 342–345
- Skoufias E., etc. (2014). "Electoral Accountability and Local Government Spending in Indonesia". Policy Research Working Paper, 6782. World Bank.